

**LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III  
TAHUN 2017 POLRES TANA TORAJA**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

- a. Reformasi Birokrasi saat ini telah memasuki tahap atau gelombang III sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Road Map nomor : Kep/541/V/2017 tentang pengesahan Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2017.
- b. Polres Bone sebagai bagian dari Kementerian/ Lembaga Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai target yang diharapkan.
- c. Dengan memasuki pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri gelombang III tahun 2015 – 2025 (Strive for Excellence) , (pelayanan prima) maka pimpinan Polri dalam hal ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. BADRODIN HAITI dalam mendukung program Presiden Republik Indonesia JOKO WIDODO / YUSUF KALLA (nawacita) , maka Kapolri telah membuat 11 Kebijakan Prioritas sebagai berikut :
  1. Penataan dalam pembinaan personel;
  2. Penataan kelembagaan dan peningkatan budaya anti korupsi;
  3. Peningkatan profesionalisme anggota polri;
  4. Peningkatan.....

4. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri dan pemenuhan sarpras khusus;
  5. Peningkatan perlindungan terhadap warga Negara untuk peningkatan rasa aman;
  6. Membangun partisipasi publik dalam pengamanan lingkungan;
  7. Mengintensifkan singergitas polisional dengan Kementerian / Lembaga;
  8. Meningkatkan pengawasan penegakkan hukum yang professional, obyektif dan bebas KKN;
  9. Mempersiapkan rencana pengamanan dan rencana kontijensi pemilukada serentak;
  10. Penguatan pengawasan Polri;
  11. Melaksanakan quick wins Polri.
- d. Kemudian pimpinan Polri menjabarkan kembali dalam program Quick Wins Polri menjadi 8 (delapan) sasaran sebagai berikut :
1. Penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila;
  2. Perburuan dan penangkapan gembong teroris Santoso dan jejaring teroris;
  3. Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme;
  4. Pembentukan dan pengefektifan satgas ops Polri kontra radikal dan deradikalisasi ( khusus Isis );
  5. Pemberlakuykan rekrutmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri;
  6. Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib social di lingkungan publik;
  7. Pembentukan tim internal anti korupsi (melibatkan unsur publik dan (KPK));

8. Crash program pelayanan masyarakat pelayanan bersih dan bebas dari percaloan.
- e. Kemudian guna mewujudkan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan Polri, “ Polri yang di percaya, yang memberikan pelayanan prima, minimal Zero complain, menjadi polri yang unggul dan profesional berdasarkan revolusi mental “ baik secara internal maupun eksternal di lingkungan masyarakat dan para pemangku kepentingan, Polri menyusun road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III tahun 2017 – 2019 yang memuat 9 Program , 37 kegiatan , 94 rencana aksi dan 15 Quick wins yang tidak lain sebagai aktualisasi 8 area perubahan bidang Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, Peraturan Perundang – Undangan dan Pelayanan Publik.

Sehingga indikator yang belum tercapai pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II tahun 2011 – 2015 akan menjadi prioritas pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III tahun 2017 – 2019. Sebagai wujud nyata dari proses Reformasi Birokrasi Polri , di jabarkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III tahun 2017 – 2019 sebagai berikut :

1. Program Revolusi Mental Aparatur.

Program ini bertujuan untuk membentuk sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif. Sasaran yang akan di capai melalui program ini adalah meningkatnya kepuasan masyarakat / publik atas pelayanan Polri, dengan ukuran keberhasilan skor survei kepuasan masyarakat ( SKM) 90 % dan skor Indeks Integritas pelayanan publik 8,5;

2. Program Penguatan sistem Pengawasan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran APIP dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan berkinerja tinggi. Sasaran yang akan di capai melalui program ini ada 2 point yaitu (1) mempertahankan penilaian laporan keuangan oleh BPK dan predikat WTP...

(wajar).....

(wajar tanpa pengecualian), dengan ukuran keberhasilan opini WTP dan (2) meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan dengan ukuran keberhasilan skor tingkat kapasitas APIP nilai 2 dan tingkat kematangan implementasi SPIP nilai 2;

3. Program penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem manajemen kinerja organisasi. Sasaran yang akan di capai melalui program ini adalah meningkatnya kinerja instansi pemerintah dengan ukuran keberhasilan peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( AKIP) mencapai 70 sebelumnya 68, 04;

4. Program penguatan kelembagaan.

Program ini bertujuan untuk membentuk organisasi pemerintahan yang tepat struktur, efektif, efisien dan berkinerja tinggi. Sasaran yang akan di capai melalui program ini adalah terwujudnya organisasi Polri yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi, sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata kelola kepolisian yang baik, dengan ukuran keberhasilan postur polri yang tepat fungsi tepatukuran dan indeks kelembagaan berdasarkan PMPRBP (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri) dan indeks tatakelola Polri ( ITK) dengan nilai 70 sebelumnya 67,23 dari skala 1-100 ;

5. Program penguatan Tatalaksana

Program ini bertujuan untuk membentuk proses manajemen Birokrasi yang sederhana, transparan, efektif dan efisien berbasis TIK. Sasaran yang akan di capai dalam program ini ada 2 point yaitu (1) terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong upaya perwujudan tatakelola kepolisian yang baik, dengan ukuran keberhasilan yaitu penerapan ketatalaksanaan yang baik dan indeks Tatalaksana dengan ITK diatas rata rata nasional atau setara nilai 7 dari skala 1 – 10 dan (2) terwujudnya ketatalaksanaan berbasis elektronik yang

Menyeluruh.....

menyeluruh dan terpadu dengan ukuran keberhasilan skor indeks e-Government dengan nilai 2,66 dan penggunaan e procurement sd 80 %;

6. Program penguatan sistem manajemen Sumber daya manusia.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme anggota Polri. Sasaran yang akan di capai melalui program ini adalah meningkatnya profesionalisme anggota polri, dengan ukuran keberhasilan skor indeks profesionalisme anggota polri 86 dari skor 1-100;

7. Program penguatan Peraturan Perundang undangan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik berbasis kebutuhan publik. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas peraturan Perundang undangan, dengan ukuran keberhasilan tercapainya peraturan perundang – undangan yang harmonis, sinkron dan pelaksanaannya efektif dan efisien;

8. Program peningkatan kualitas pelayanan Publik.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terus menerus. Sasaran yang akan di capai melalui program ini ada 2 point yaitu (1) meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan ukuran keberhasilan skor hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) 90 % dan (2) meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik dengan ukuran keberhasilan jumlah inovasi pelayanan, hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik, skor indeks integritas pelayanan publik dengan nilai 8,5; prosentase tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25/2009 tentang pelayanan publik, tindak lanjut pengaduan pelayanan publik dan public service indeks dengan menetapkan zona hijau ada pelayanan di 10 satpas dan 453 pelayanan SKCK;

## 9. Program Monitoring dan Evaluasi

Program ini bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan, kegiatan, rencana aksi dan target yang telah ditetapkan. Hasil yang ingin dicapai melalui program ini adalah memberikan peringatan diri tentang resiko kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan.

f. Selanjutnya dengan pergantian pimpinan Polri dari Jenderal Pol Drs. BADRODIN HAITI kepada Jenderal Pol Drs. M. TITO KARNAVIAN.MA, Ph.D, maka pimpinan Polri yang baru Jenderal Pol Drs. M. TITO KARNAVIAN.MA, Ph.D melanjutkan program Reformasi Birokrasi Polri dengan membuat Program Prioritas Kapolri ( Promoter) yaitu , Profesional, Modern dan Terpercaya sebagai berikut :

1. pemantapan Reformasi internal Polri;
2. peningkatan pelayanan yang lebih mudah bagi masyarakat yang berbasis teknologi informasi (IT);
3. penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal;
4. peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan;
5. peningkatan kesejahteraan Polri;
6. penataan kelembagaan dan pemenuhan proporsionalitas anggaran serta kebutuhan minimal sarpras;
7. penguatan Harkamtibmas;
8. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas;
9. penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan;
10. penguatan Pengawasan.

g. Dan Kapolri Jenderal Pol Drs. TITO KARNAVIAN.MA.Ph.D selain membentuk Program Prioritas yang disebut dengan **Promoter ( Profesional, Modern dan Terpercaya)**, juga membentuk **COMMANDER WISH KAPOLRI** yaitu :

1. Reformasi.....

1. Reformasi Kultural;
  - a. menekan budaya koruptif;
  - b. sosok polisi yang humanis.
2. Perbaikan layanan Publik;
3. Peningkatan Profesionalisme dalam penegakan Hukum;
4. Peningkatan Stabilitas Kamtibmas;
5. Manajemen Media.

## **2. Dasar**

- a. Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 20125;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
- c. Keputusan Kapolri nomor : Kep / 541 / V / 2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pengesahan Road Map Reformasi Birokrasi Polri gelombang III tahun 2017 – 2019;
- d. Surat Perintah Kapolda Sulsel nomor : Sprin / 1331 / VIII / 2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang pelaksanaan reformasi birokrasi polri gelombang III tahun 2015-2019 di lingkungan Polda Sulsel;
- e. Surat perintah Kapolres Tana Toraja nomor : Sprin /650/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang pelaksanaan reformasi birokrasi polri gelombang III lingkungan Polres Tana Toraja.

## **3. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud  
Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran kepada pimpinan tentang evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2017 di Polres Tana Toraja.
- b. Tujuan  
Sebagai bahan masukan kepada pimpinan guna bahan pengambilan keputusan tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2017 di Polres Tana Toraja.

## **4. Ruang.....**

**4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup laporan ini meliputi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2017 di Polres Tana Toraja.

**5. Tata Urut**

- I. PENDAHULUAN
- II. RENCANA PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI TAHUN 2017
- III. HASIL YANG DICAPAI
- IV. ANALISIS DAN EVALUASI
- V. PENUTUP

**BAB II**  
**RENCANA PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI**  
**GELOMBANG III TAHUN 2017**

**6. Program I tentang REVOLUSI MENTAL APARATUR**

**a. Penanggung Jawab Program Kabag Sumda.**

**b. Satker pendukung.**

- a. Kasat Intelkam;
- b. Kasat Reskrim;
- c. Kasat Lantas;
- d. Kasat sabhara;
- e. Kasat Binmas;
- f. Kasat Polair;
- g. Kasi propam.

**c. Hasil yang di harapkan.**

- 1) Meningkatnya penerapan / internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan;
- 2) Meningkatnya budaya kinerja positif di setiap instansi pemerintah;
- 3) Meningkatnya integritas aparatur;
- 4) Meningkatnya profesionalisme aparatur;
- 5) Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayanan masyarakat;
- 6) Meningkatnya kepuasan masyarakat.

**d. Kegiatan.**

- 1) pengembangan nilai – nilai untuk menegakkan integritas;
- 2) pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir.

**e. Rencana aksi.**

- 1) Pembuatan kurikulum dan modul;
- 2) Pembacaan Tribrata, Catur Prasetya, Pembacaan Panca Prasetya Korpri pada saat apel pagi;
- 3) Melakukan dikjur sesuai dengan kompetensi;

4) Membentuk.....

- 4) Membentuk dan meningkatkan jumlah TOT revolusi mental dan bela Negara;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil TOT;
- 6) Membentuk tim agen perubahan;
- 7) Melaksanakan pelatihan VCD fungsi.

**7. Program II tentang PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN**

**a. Penanggung Jawab Program KASIWAS.**

**b. Satker Pendukung.**

- a. Kabagren;
- b. Kasat Reskrim;
- c. Kasi Propam;
- d. Kasi Keu.

**c. Hasil yang di harapkan.**

- 1) Meningkatnya kapasitas APIP;
- 2) Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional dan sinergis;
- 3) Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN;
- 4) Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan Birokrasi;
- 5) Menurunnya tingkat penyimpangan aparatur;
- 6) Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP – BPK.

**d. Kegiatan.**

- i. membentuk unit kerja untuk menuju wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK) / wilayah birokrasi bersih dan melayani ( WBBM);
- ii. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- iii. pelaksanaan whistleblowing sistem;
- iv. pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;
- v. pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja;
- vi. penanganan pengaduan masyarakat.

**e. Rencana aksi.....**

**e. Rencana aksi.**

- 1) meningkatkan kapabilitas APIP;
- 2) Penyelenggaraan wasrik, reuiu pemantauan tindak lanjut dan evaluasi Akuntabilitas Intansi Pemerintah;
- 3) Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui indeks Tata Kelola Polri (ITK);
- 4) Penerapan WBK / WBBM;
- 5) Pemenuhan LHKPN;
- 6) Pemenuhan laporan keuangan;
- 7) Penerapan disiplin dan kode etik;
- 8) Pengendalian gratifikasi;
- 9) Penerapan whistle blower sistem;
- 10) Penanganan benturan kepentingan;
- 11) Optimalisasi penataan penyelenggaraan SPIP pada satker di lingkungan Polri;
- 12) Membangun sistem pengaduan masyarakat.

**8. Program III tentang PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA****a. Penanggung Jawab Program KABAGREN.****b. Satker Pendukung.**

- a. Kasubbag Sarpras;
- b. Kasi Keuangan.

**c. Hasil yang di harapkan.**

- 1) meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi;
- 2) meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, dan profesional;
- 3) Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja nasional;
- 4) Meningkatnya akuntabilitas aparatur.

**d. Kegiatan.**

Pembangunan / Pengembangan TehnologiInformasi dalam manajemen Kinerja.

**e. Rencana aksi.....**

**e. Rencana aksi.**

- 1) Pembuatan dokumen perjanjian kinerja, sebagaimana perkap no. 6 tahun 2015;
- 2) Menyediakan alat pengelola data untuk melaksanakan pelaporan pembayaran belanja pegawai pada polri dengan menggunakan aplikasi BPP dan aplikasi GPP;
- 3) Mengusulkan personel untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- 4) Penggunaan e proc terhadap belanja pengadaan barang tingkat polres;
- 5) Penyusunan IKU yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat.

**9. Program IV tentang PENGUATAN KELEMBAGAAN**

**a. Penanggung Jawab Program KABAGREN.**

**b. Satker pendukung. -**

**c. Hasil yang di Harapkan.**

- a. meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi nasional;
- b. meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme kelembagaan Kementerian / Lembaga / Pemerintah non Kementerian/lembaga non struktural;
- c. menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar Kementerian / Lembaga dengan pemerintah daerah;
- d. meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat , provinsi dan kabupaten / kota;
- e. meningkatnya sinergisme kelembagaan antara instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing – masing bidang pembangunan;
- g. meningkatnya kinerja aparatur.

**d. Kegiatan.**

Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri.

**e. Rencana aksi.**

**e. Rencana aksi.....**

- 1) Peningkatan tipe polsubsektor dari subsektor menjadi pra Rural.
- 2) Peningkatan sinergi Polisional kelembagaan antara instansi terkait pemerintah pusat dan daerah

**10. Program V tentang PENGUATAN TATA LAKSANA**

**a. Penanggung Jawab Program KABAGREN.**

**b. Satker Pendukung.**

- a. Kasubbag Sarpras;
- b. Kasubbag Humas;
- c. Kasi Propam;
- d. Kasium.

**c. Hasil yang dicapai.**

- 1) meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis E-government;
- 2) meningkatnya kualitas tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah;
- 3) meningkatnya penerapapan keterbukaan informasi publik;
- 4) Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
- 5) Meningkatnya penerapapan manajemen kearsipan yang handal;
- 6) Meningkatnya kualitas pelayanan.

**d. Kegiatan.**

- 1) Penerapan E –government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- 2) Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Implementasi keterbukaan Undang- Undangn Keterbukaan Publik;
- 4) Penerapan sistem kearsipan yang handal.

**e. Rencana aksi.**

- 1) Penerapan LPSE pengadaan barang dan jasa pada tingkat satker;

2) Penerapan.....

- 2) Penerapan sistem pengolahan informasi dan dokumentasi ( e-document dan e-office);
- 3) Penyempurnaan draf almatsus Polri;
- 4) Pengkajian HTCK pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan / pelayanan di tingkat Polres;
- 5) Penyusunan SOP pada tingkat satker Polres;
- 6) Penyusunan evaluasi dan analisa beban kerja ( ABK) dalam rangka penerapan pembayaran tunjangan kinerja;
- 7) Evaluasi implementasi perkap nomor 12 tahun 2013 tentang layanan pengadaan secara elektronik ( LPSE);
- 8) Terbangunnya e-office yang terintegrasi.

**11. Program VI tentang PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**

**a. Penanggung Jawab Program KABAG SUMDA.**

**b. Satker Pendukung.-**

**c. Hasil yang di harapkan.**

- a. Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif;
- b. Meningkatnya kepatuhan instansi untuk menerapkan manajemen SDM polri yang berbasis merit;
- c. Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur;
- d. Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk *talentpool* (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya;
- e. Meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungannya;
- f. Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan;
- g. Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur;
- h. Meningkatnya profesionalisme aparatur.

**d. kegiatan.....**

**d. Kegiatan.**

- 1) Perbaikan berkelanjutannya sistem perencanaan kebutuhan polri;
- 2) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;
- 3) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka;
- 4) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center;
- 5) Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja personel polri;
- 6) Perumusan dan penetapan reward and punishment berbasis kinerja;
- 7) Pembangunan / pengembangan sistem informasi personel polri;
- 8) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan personel polri;
- 9) Perumusan dan penetapan kebijakan / pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat polri;
- 10) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat;
- 11) Penerapan sistem promosi secara terbuka kompetitif, dan berbasis kompetensi di dukung oleh makin efektifnya pengawasan;
- 12) Menyusun dan menetapkan pola karier;
- 13) Pengukuran GAP competency( Kesenjangan kompetensi antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan);
- 14) Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.

**e. Rencana aksi.**

- 1) Penyusunan rencana kebutuhan personel polri dalam memenuhi standar ideal minimal dengan prinsip minimal zero growth;
- 2) Pendistribusian kuota pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan satker dan kaderisasi personel;

3) Rekrutmen.....

- 3) Rekrutmen anggota polri di wilayah perbatasan, wilayah pesisir dan pulau pulau terluar;
- 4) Pendaftaran untuk rekrutmen dan seleksi anggota polri melalui penggunaan teknologi informasi (online) di tingkat Polda dan Polres;
- 5) Pelaksanaan rekrutmen yang proaktif melalui kampanye rekrutmen setiap hari sepanjang tahun di tingkat polres dan polsek;
- 6) Kebijakan sistem promosi dengan mekanisme;
  - a. Pengumuman dan pendaftaran secara terbuka;
  - b. Penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang (substansi tugas);
  - c. Tata cara pengisian jabatan setruktural dan fungsional.
- 7) Menetapkan kebijakan kompetensi dalam jabatan struktural di tingkat polres dan polsek maupun jabatan fungsional umum;
- 8) Menetapkan kebijakan pengembangan assessment center dalam pembinaan karier sampai tingkat polsek;
- 9) Mengikuti Pelatihan dan sertifikasi bagi para assessor di tingkat polda;
- 10) Menindaklanjuti adanya revisi peraturan Kapolri tentang penilaian kinerja bagi anggota polri dengan SMK;
- 11) Penyusunan kebijakan reward and punishment bagi anggota polri;
- 12) Menerapkan promosi terbuka pada jabatan tertentu di tingkat polres;
- 13) Pembentukan dan penerapan sistim pengawasan pelaksanaan proses seleksi promosi jabatan struktural dan fungsional untuk menjamin system merit dalam binkar personel polri;
- 14) Menyusun dan menerapkan pola karier dengan pedoman merit system yang bebas dari KKN, transparan dan akuntabel;
- 15) Menyusun dan menetapkan seleksi / uji kompetensi bagi pemangku jabatan yang telah habis masa jabatannya untuk menduduki jabatan periode tertentu;
- 16) Melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran hasil assessment;

17) Kerja.....

- 17) Kerja sama dengan pendidikan dan pelatihan guna pengembangan kapasitas SDM Polres dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas melalui perintisan Mou maupun perpanjangan Mou bidang pendidikan dan pelatihan.

**12. Program VII tentang PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

**a. Penanggung Jawab Program KABAG SUMDA, KASUBBAG HUKUM.**

**b. Satker pendukung.-**

**c. Hasil yang diharapkan.**

- 1) meningkatnya ketertiban publik dalam proses perumusan kebijakan;
- 2) meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

**d. Kegiatan.**

- 1) Evaluasi secara berkala bagi peraturan Perundang – undangan yang sedang diberlakukan;
- 2) Menyarankan / memberikan masukan tentang peraturan perundang undangan yang di pandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;
- 3) Memberikan masukan tentang peraturan perundang-undangan yang di pandang menghambat pelayanan.

**e. Rencana aksi.**

- a. Memetakan peraturan perundang – undangan yang berlaku, terutama di lingkungan Polri (Perkap);
- b. Mangajukan untuk Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang – undangan, terutama perkap(Peraturan Kapolres);
- c. Menindaklanjuti tentang revisi perkap 26 tahun 2010;

**13) Program.....**

### 13. Program VIII tentang PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### A. FUNGSI LALU LINTAS.

- a. **Penanggung Jawab Pelayanan Publik Fungsi Lalu Lintas, KASAT LANTAS.**
- b. **Kondisi yang di harapkan;**
  - a. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
  - c. Meningkatnya profesionalisme aparatur.
- c. **Kegiatan;**
  - 1) Penerapan pelayanan satu atap;
  - 2) Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;
  - 3) Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan;
  - 4) Pembangunan / pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan.
- d. **Rencana aksi;**
  - 1) Pengembangan SIM online ( pelayanan perpanjangan SIM);
  - 2) Penyempurnaan sistem uji SIM;
  - 3) Peningkatan profesionalitas sumber daya petugas penerbit SIM melalui kompetensi penguji SIM;
  - 4) Standarisasi kantor pelayanan SIM/satpas;
  - 5) Pelayanan satpas bersih dari calopengaktifan resident ranmor yang terintegrasi.

#### B. FUNGSI INTELKAM.

- a. **Penanggung Jawab Pelayanan Publik Fungsi Intelkam, KASAT INTELKAM.**
- b. **Hasil yang di harapkan.**
  - 1) Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
  - 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
  - 3) Meningkatnya profesionalisme aparatur.

c. Kegiatan.....

**c. Kegiatan.**

- 1) Penerapan pelayanan satu atap;
- 2) Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;
- 3) Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan;
- 4) Pembangunan / pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan;

**d. Rencana aksi.**

- 1) Membangun akses aplikasi secara online dalam rangka pelayanan SKCK.
  - a. Terimplementasinya aplikasi registrasi SKCK online di satker Polres;
  - b. Terlaksananya sertifikasi petugas penerbit SKCK di satker Polres;
  - c. Terimplentasinya aplikasi penerimaan dan penyetoran PNPB secara online tingkat Polres;
  - d. Terlaksananya penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat;
  - e. Deklarasi pernyataan zona bebas percaloan SKCK di tingkat Polres.
- 2) Membangun link sistem online tentang data kriminalitas perorangan dengan pusiknas.
  - a. terimplementasinya catatan kriminal di satker polres dan polsek;
  - b. terbangunnya rancang bangun (kajian akademik intregated SKCK online);
  - c. terimplementasinya intregated SKCK online.
- 3) Penerapan sistem first in first out di level polres.

**C. FUNGSI BINMAS****a. Penanggung Jawab Pelayanan Publik Fungsi Binmas, KASAT BINMAS.****b. Hasil yang di harapkan.**

- 1) Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;

2. Meningkatnya.....

- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
- 3) Meningkatnya profesionalisme aparatur.

**c. Kegiatan.**

- 1) Penerapan pelayanan satu atap;
- 2) Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;
- 3) Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan;
- 4) Pembangunan / pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan.

**d. Rencana aksi.**

- 1) Melaksanakan peraturan Dir Binmas, perkaba tentang Adr / Rj;
- 2) Menindak lanjuti Peraturan Dit Binmas / perkabaharkam tentang pelayanan BUJP online;
- 3) Penerapan sentra pelayanan masyarakat ( mobile).

**D. FUNGSI SABHARA**

**a. Penanggung Jawab Pelayanan Publik Fungsi Sabhara, KASAT SABHARA.**

**b. Hasil yang di harapkan.**

- 1) Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
- 3) Meningkatnya profesionalisme aparatur.

**c. Kegiatan.**

- 1) Penerapan pelayanan satu atap;
- 2) Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;
- 3) Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan;
- 4) Pembangunan / pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan.

**d. Rencana aksi.**

- 1) Menindaklanjuti revisi perkabaharkam tentang patroli;
- 2) Tergelarnya turjawali di tempat-tempat rawan kriminalitas dan kemacetan;
- 3) Tergelarnya kendaraan patroli berbasis GPS.

**E. FUNGSI RESKRIM**

**E. FUNGSI.....**

- a. **Penanggung Jawab Pelayanan Publik Fungsi Reskrim, KASAT RESKRIM.**
- b. **Hasil yang di harapkan.**
  - 1) Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
  - 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
  - 3) Meningkatnya profesionalisme aparatur.
- c. **Kegiatan.**
  - 1) Penerapan pelayanan satu atap;
  - 2) Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;
  - 3) Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan;
  - 4) Pembangunan / pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan.
- d. **Rencana aksi.**
  - 1) Sistem informasi LP, SPDP online dengan kemenkumham, kejaksaan dan Bapennas seluruh Indonesia;
  - 2) Penerapan SP2HP online di seluruh wilayah indonesia melalui pusiknas;
  - 3) Menindaklanjuti tentang revisi perkaba perkap dan SOP;
  - 4) Sertifikasi penyidik Polri dan PPNS.

#### **F. FUNGSI POLAIR**

- a. **Penanggung Jawab Pelayanan Publik Fungsi Polair, KASAT POLAIR.**
- b. **Hasil yang di harapkan.**
  - 1) Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
  - 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
  - 3) Meningkatnya profesionalisme aparatur.
- c. **Kegiatan.**
  - 1) Penerapan pelayanan satu atap;
  - 2) Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;
  - 3) Deregulasi.....

- 3) Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan;
- 4) Pembangunan / pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan.

**d. Rencana aksi.**

- 1) Meningkatkan pengamanan area Hotspot prioritas, area labuh, kapal-kapal niaga dan wilayah pelabuhan;
- 2) Meningkatnya giat Polmas dan sambang ke daerah pesisir terluar dan berpenghuni;
- 3) Terintegrasinya sistem monitoring dan kontrol terhadap kapal-kapal ikan kerjasama dengan KKP dalam rangka penanggulangan IUU Fishing.

**14. Program IX tentang MONITORING DAN EVALUASI**

**a. Penanggung Jawab, KABAGREN.**

**b. Satker terkait ; -**

**c. Hasil yang di harapkan.**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri berjalan sesuai dengan Road Map dalam mewujudkan 3 sasaran reformasi Birokrasi Polri Gel. III tahun 2017-2019 yaitu;

- 1) Birokrasi yang bersih dan Akuntabel;
- 2) Birokrasi yang efektif dan efisien;
- 3) Dan Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik berkualitas.

**d. Kegiatan.**

- 1) Monitoring;
- 2) Evaluasi.

**e. Rencana aksi.**

- 1) Penyusunan SOP pedoman monitoring;
- 2) Pembuatan laporan monitoring;
- 3) Laporan tahunan;
- 4) Laporan keseluruhan.

### **BAB III**

#### **HASIL YANG DICAPAI**

Hasil yang dicapai pelaksanaan Program, Kegiatan dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2015-2019 yang dijabarkan berdasarkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Polri Polres Bone Gelombang III Tahun 2017, sebagai berikut:

**15. Program I tentang REVOLUSI MENTAL APARATUR**

Terlaksananya Program Revolusi Mental Aparatur

**16. Program II tentang PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN**

Terlaksananya Program Penguatan Pengawasan

**17. Program III tentang PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.**

Terlaksananya Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

**18. Program IV tentang PENGUATAN KELEMBAGAAN**

Terlaksananya Program Penguatan Kelembagaan

**19. Program V tentang PENGUATAN TATA LAKSANA**

Terlaksananya Program Penguatan Tata Laksana

**20. Program VI tentang PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA.**

Terlaksananya Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

**21. Program VII tentang PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

Terlaksananya Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan

**22. Program VIII tentang PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

a) Terlaksananya Program Peningkatan Pelayanan Publik Fungsi Lalu Lintas;

b) Terlaksananya Program Peningkatan Pelayanan Publik Fungsi Intelkam;

c) Terlaksananya Program Peningkatan Pelayanan Publik Fungsi Binmas;

d. Terlaksananya.....

- d) Terlaksananya Program Peningkatan Pelayanan Publik Fungsi Sabhara;
- e) Terlaksananya Program Peningkatan Pelayanan Publik Fungsi Reskrim;
- f) Terlaksananya Program Peningkatan Pelayanan Publik Fungsi Polair.

**23. Program IX tentang MONITORING DAN EVALUASI**

Terlaksananya Program Monitoring dan Evaluasi.

## BAB IV

### ANALISIS DAN EVALUASI

#### 24. Analisis dan Evaluasi Hasil yang Dicapai

Berdasarkan uraian hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2017 dapat dianalisis dan dievaluasi sebagai berikut:

##### a. Program Revolusi Mental Aparatur

- 1) Pembuatan kurikulum dan modul pada tingkat Polda dan Mabes, untuk Satker Polres hanya menerima kurikulum dan modul dari Polda dan Mabes;
- 2) Pembacaan Tribrata, Catur Prasetya, Pembacaan Panca Prasetya Korpri pada saat apel pagi sudah terlaksana sesuai rencana;
- 3) Melakukan dikjur sesuai dengan kompetensi, telah dilaksanakan sesuai permintaan dikjur/pelatihan yang akan diikuti;
- 4) Membentuk dan meningkatkan jumlah TOT revolusi mental dan bela Negara, belum melaksanakan;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil TOT, belum melaksanakan.
- 6) Membentuk tim agen perubahan, sudah ada personil yang diperintahkan untuk mengikuti pelatihan agen perubahan;
- 7) Melaksanakan pelatihan fungsi kepolisian, telah melaksanakan pelatihan fungsi Lantas, Binmas, Intelkam, sabhara, reskrim dan Polair.

##### b. Program Penguatan Pengawasan

1. meningkatkan kapabilitas APIP,
2. Penyelenggaraan wasrik, reviu pemantauan tindak lanjut dan evaluasi Akuntabilitas Intansi Pemerintah, telah dilaksanakan supervisi pengawasan ke Bagian, Satuan dan Polsek jajaran;
3. Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui indeks Tata Kelola Polri (ITK); telah melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui ITK dan telah dilaksanakan penilaian dari Polda.
4. Penerapan WBK / WBBM, sudah diterapkan;
5. Pemenuhan LHKPN, sudah terpenuhi namun belum mencapai 100%;

6) Pemetaan.....

6. Pemenuhan laporan keuangan, sudah dipenuhi;
7. Penerapan disiplin dan kode etik, sudah diterapkan;
8. Pengendalian gratifikasi, sudah diterapkan;
9. Penerapan whistle blower sistem, sudah diterapkan;
10. Penanganan benturan kepentingan, sudah diterapkan;
11. Optimalisasi penataan penyelenggaraan SPIP pada satker di lingkungan Polri, sudah optimal;
12. Membangun sistem pengaduan masyarakat, sudah terlaksana.

**c. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

- 1) Pembuatan dokumen perjanjian kinerja, telah dibuat;
- 2) Menyediakan alat pengelola data untuk melaksanakan pelaporan pembayaran belanja pegawai pada polri dengan menggunakan aplikasi BPP dan aplikasi GPP, sudah dilaksanakan melalui aplikasi;
- 3) Mengusulkan personel untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa, tidak ada personil yang diusulkan mengikuti pelatihan;
- 4) Penggunaan e proc terhadap belanja pengadaan barang tingkat polres, masih di kelola oleh Polda Sulsel;
- 5) Penyusunan IKU yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat, telah disusun.

**d. Program Penguatan Kelembagaan**

1. Peningkatan sinergi Polisional kelembagaan antara instansi terkait pemerintah pusat dan daerah, sudah dilaksanakan.

**e. Program Penguatan Tata Laksana**

- 1) Penerapan LPSE pengadaan barang dan jasa pada tingkat satker, sudah diterapkan melalui aplikasi LPSE Polda;
- 2) Penerapan sistem pengolahan informasi dan dokumentasi (e-dokument dan e-office), sudah diterapkan;
- 3) Penyempurnaan draf almatsus Polri, belum disempurnakan;
- 4) Pengkajian HTCK pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan / pelayanan di tingkat Polres, belum dilaksanakan.

5) Penyusunan.....

- 5) Penyusunan SOP pada tingkat satker Polres, sudah ada SOP;
- 6) Penyusunan evaluasi dan analisa beban kerja (ABK) dalam rangka penerapan pembayaran tunjangan kinerja, belum dilaksanakan;
- 7) Evaluasi implementasi perkap nomor 12 tahun 2013 tentang layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), belum dilaksanakan;
- 8) Terbangunannya e-office yang terintegrasi, sudah terlaksana.

**f. Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia**

1. Penyusunan rencana kebutuhan personel polri dalam memenuhi standar ideal minimal dengan prinsip minimal zero growth, sudah dilaksanakan;
2. Pendistribusian kuota pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan satker dan kaderisasi personel, dilaksanakan oleh Polda;
3. Rekrutmen anggota polri di wilayah perbatasan, wilayah pesisir dan pulau pulau terluar, Polres Tana Toraja tidak memiliki daerah terluar;
4. Pendaftaran untuk rekrutmen dan seleksi anggota polri melalui penggunaan teknologi informasi (online) di tingkat Polda dan Polres, sudah dilaksanakan secara online;
5. Pelaksanaan rekrutmen yang proaktif melalui kampanye rekrutmen setiap hari sepanjang tahun di tingkat polres dan polsek, sudah dilaksanakan melalui kampanye;
6. Kebijaksanaan sistem promosi dengan mekanisme, telah dilaksanakan sesuai prosedur:
7. Pengumuman dan pendaftaran secara terbuka;
8. Penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang (substansi tugas);
9. Tata cara pengisian jabatan struktural dan fungsional.
10. Menetapkan kebijakan kompetensi dalam jabatan struktural di tingkat polres dan polsek maupun jabatan fungsional umum, sudah terlaksana;
11. Menetapkan kebijakan pengembangan assessment center dalam pembinaan karier sampai tingkat polsek, pelaksanaan tingkat Polda;
12. Mengikuti Pelatihan dan sertifikasi bagi para assesor di tingkat polda, sudah mengusulkan personil pelatihan assesor;
13. Menindaklanjuti adanya revisi peraturan Kapolri tentang penilaian kinerja bagi anggota polri dengan SMK , sudah ditindaklanjuti;

14. Penyusunan kebijakan reward and punishment bagi anggota polri, sudah disusun;
15. Menerapkan promosi terbuka pada jabatan tertentu di tingkat polres, sudah diterapkan;
16. Pembentukan dan penerapan sistim pengawasan pelaksanaan proses seleksi promosi jabatan struktural dan fungsional untuk menjamin system merit dalam binkar personel polri , sudah terlaksana;
17. Menyusun dan menerapkan pola karier dengan pedoman merit system yang bebas dari KKN, transparan dan akuntabel, belum terlaksana;
18. Menyusun dan menetapkan seleksi / uji kompetensi bagi pemangku jabatan yang telah habis masa jabatannya untuk menduduki jabatan periode tertentu, belum terlaksana;
19. Melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran hasil assessment, sudah terlaksana;
20. Kerja sama dengan pendidikan dan pelatihan guna pengembangan kapasitas sdm Polres dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas melalui perintisan MoU maupun perpanjangan MoU bidang pendidikan dan pelatihan, belum terlaksana.

**g. Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan**

- 1) Memetakan peraturan perundang – undangan yang berlaku, terutama di lingkungan Polri ( Perkap), sudah terlaksana;
- 2) Mangajukan untuk Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang – undangan, terutama perkap (Peraturan Kapolres), belum ada peraturan yang akan di harmonisasi;
- 3) Menindaklanjuti tentang revisi perkap 26 tahun 2010, belum ada revisi perkap.

**h. Program Peningkatan Pelayanan Publik\**

**A. FUNGSI LALU LINTAS**

1. Pelaksanaan Pengembangan SIM online (pelayanan perpanjangan SIM), Polres Tana Toraja belum sistem online;
2. Penyempurnaan sistem uji SIM, dalam proses penyempurnaa;

3. Peningkatan profesionalitas sumber daya petugas penerbit SIM melalui kompetensi penguji SIM, sudah ada personil yang melaksanakan pelatihan kompetensi penguji SIM;
4. Standarisasi kantor pelayanan SIM/satpas, sudah sesuai standar;
  - Pelayanan satpas bersih dari calo pengaktifan resident ranmor yang terintegrasi , sudah terlaksana.

#### 1. **FUNGSI INTELKAM.**

- 4) Membangun akses aplikasi secara online dalam rangka pelayanan SKCK;
  - a. Terimplementasinya aplikasi registrasi SKCK online di satker Polres, melalui situs web: [http://skck.polri.go.id/.](http://skck.polri.go.id/);
  - b. Terlaksananya sertifikasi petugas penerbit SKCK di satker Polres, Petugas SKCK Polres Tana Toraja belum ada sertifikasi;
  - c. Terimplentasinya aplikasi penerimaan dan penyetoran PNBP secara online tingkat Polres, Polres Tana Toraja belum Online;
  - d. Terlaksananya penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat, sudah terlaksana survei IKM;
  - e. Deklarasi pernyataan zona bebas percaloan SKCK di tingkat Polres, sudah dilaksanakan Deklarasi.
- 5) Membangun link sistem online tentang data kriminalitas perorangan dengan pusiknas.
  - d. terimplementasinya catatan kriminal di satker polres dan polsek, Masih terpusat di Mabes Polri;
  - e. terbangunnya rancang bangun (kajian akademik intregated SKCK online), Polres Tana Toraja sudah ada;
  - f. terimplementasinya intregated SKCK online, Polres Tana Toraja sudah intregated SKCK sistem online;
  - g. Penerapan sistem first in fist out di level polres, Polres Tana Toraja menerapkan sistem aplikasi antrian.

#### 2. **FUNGSI BINMAS**

- 1) Melaksanakan peraturan Dir Binmas, perkaba tentang Adr / Rj, sudah dilaksanakan;
- 2) Menindak lanjuti Peraturan Dit Binmas / perkabahar' BUJP online, belum online;
  - 2) Menindaklanjuti.....
- 3) Penerapan sentra pelayanan masyarakat (mobile), sudah dilaksanakan.

### **3. FUNGSI SABHARA**

- 1) Menindaklanjuti revisi perkabaharkam tentang patroli, sudah dilaksanakan;
- 2) Tergelarnya turjawali di tempat-tempat rawan kriminalitas dan kemacetan, sudah dilaksanakan
- 3) Tergelarnya kendaraan patroli berbasis GPS, Polres Tana Toraja belum memiliki kendaraan Patroli berbasis GPS.

### **4. FUNGSI RESKRIM**

- 5) Sistem informasi LP, SPDP online dengan kemenkumham, kejaksaan dan Bapennas seluruh Indonesia, Polres Tana Toraja belum sistem online;
- 6) Penerapan SP2HP online di seluruh wilayah indonesia melalui pusiknas, Polres Tana Toraja belum sistem online;
- 7) Menindaklanjuti tentang revisi perkaba perkap dan SOP, sudah dilaksanakan;
- 8) Sertifikasi penyidik Polri dan PPNS, sudah ada sertifikasi.

#### **i. FUNGSI POLAIR**

- 4) Meningkatkan pengamanan area Hotspot prioritas, area labuh, kapal-kapal niaga dan wilayah pelabuhan, sudah dilaksanakan;
- 5) Meningkatnya giat Polmas dan sambang ke daerah pesisir terluar dan berpenghuni, sudah dilaksanakan;
- 6) Terintegrasinya sistem monitoring dan kontrol terhadap kapal-kapal ikan kerjasama dengan KKP dalam rangka penanggulangan IUU Fishing, sudah terintegrasi.

#### **i. Program Monitoring dan Evaluasi**

- 1) Penyusunan SOP pedoman monitoring, sudah disusun;
- 2) Pembuatan laporan monitoring, sudah dibuat Laporan Bulanan;
- 3) Laporan tahunan, sudah dibuat Laporan Anev RBP;
- 4) Laporan keseluruhan, belum selesai secara keseluruhan.

#### **i. BAB V**

**BAB V****PENUTUP****25. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil yang dicapai pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III tahun 2017 sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan hasil evaluasi secara umum, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri telah berjalan sesuai dengan rencana aksi dalam Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2017 dan rencana aksi Polres Tana Toraja yang meliputi 9 (sembilan) program Reformasi Birokrasi Polri;
- b. Beberapa rencana aksi belum terlaksana karena karena menjadi kewenangan dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Mabes Polri dan Polda Sulsel;
- c. Program Reformasi Birokrasi Polri sebagian telah dilaksanakan dan diimplementasikan sebagaimana kegiatan dan rencana aksi pada program Reformasi Birokrasi Polri tahun 2017;
- d. Dukungan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Polri belum secara khusus didukung dalam DIPA Polri;

**26. Rekomendasi**

- a. Berdasarkan uraian kesimpulan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2017 sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, direkomendasikan perlu adanya konsistensi dalam pelaksanaan implementasi Reformasi Birokrasi Polri dengan memberikan keteladanan dan motivasi kepada anggota dari Pimpinan tingkat bawah sampai dengan tingkat atas;
- b. Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2017, disarankan untuk dilaksanakan rencana tindak lanjut masing-masing program;

- c. Perlunya ada dukungan anggaran pada kegiatan Reformasi Birokrasi Polri, sehingga ke 9 Program dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana aksi;
- d. Perlunya dilaksanakan Supervisi oleh Tim RBP ke seluruh jajaran Polres Tana Toraja untuk melihat secara langsung tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri diJajaran.

Demikianlah laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2017 Polres Tana Toraja disusun sebagai bahan masukan kepada pimpinan untuk menetapkan arah dan kebijakan lebih lanjut.

Makale ,            Desember    2017

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANA TORAJA  
WAKA

ARCHELAS LIMPONG,S.Pd.  
KOMISARIS POLISI NRP 60040950